

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024, dimana Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Setda) diampu oleh seluruh Biro.
2. Meningkatnya Kebijakan Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (Biro Hukum)
3. Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan indikator nilai Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
4. Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator nilai Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan indikator nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)
6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah dengan indikator nilai Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)
7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah dengan indikator Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)
9. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur dengan

indikator nilai Indeks Kelembagaan (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)

10. Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan indikator nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
11. Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah) dengan indikator nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda dengan indikator Presentase Realisasi Pelayanan Setda (Biro Umum dan Perlengkapan)

Laporan ini memuat capaian kinerja biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah dengan menampilkan target dan capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RPKD) Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 12 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

1. Nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 70-80, dalam laporan ini menyajikan capaian nilai sakip Setda Tahun 2023 yaitu sebesar 78,10;
2. Nilai Indeks kualitas kebijakan ditargetkan 71, capaian realisasi 66,77 capaian 94,04%;
3. Nilai Skoring/Nilai LPPD ditargetkan mencapai 4,29, realisasi nilai 3,46 (nilai tahun 2023) capaian 80,65%;
4. Presentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di implementasikan ditargetkan 100% hasil 100%.
5. Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkat 86,55 realisasi 89,23 atau 103,10%;
6. Presentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang di implementasikan ditargetkan 100% hasil 71,43%
7. Presentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi yang di implementasikan ditargetkan 100% hasil 133%
8. Presentase Realisasi Pelayanan Pimpinan ditargetkan 100% hasil 100%

9. Nilai indeks kelembagaan ditargetkan mencapai 84,2 hasil 84,2 (nilai tahun 2023) atau 100%
10. Nilai kepatuhan pelayanan publik ditargetkan mencapai 91,16 hasil 91,16 (nilai tahun 2023) atau 100%
11. Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi ditargetkan mencapai 11,17 hasil 10,72 (nilai tahun 2023) atau 99,54%
12. Persentase realisasi pelayanan SETDA ditargetkan mencapai 100% hasil 100%

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 untuk menunjang program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran = **Rp. 251.934.466.314,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*)

Realisasi Anggaran = **Rp. 235.659.143.463,-** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)
atau **93,54%,**

Sisa anggaran = **Rp. 16.275.322.851,-** (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau **6,46%.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT., karena berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dapat disajikan, yang mana merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2024 kepada seluruh stakeholder/pemangku kepentingan dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam memperbaiki kinerja dimasa depan.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dan rencana strategis. *Pengejawantahan* pertanggungjawaban dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2024 merupakan implementasi pengukuran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan koreksi atas kelemahan yang ada, dan mempertajam prioritas pembangunan ditahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap agar informasi yang disajikan dalam evaluasi kinerja diakhir tahun anggaran 2024 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan untuk terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Banten Provincial Government. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI BANTEN" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom. In the center is the coat of arms of Banten. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Nana Supiana

DAFTAR ISI

IKTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah	7
1.6 Peta Probis Sekretariat Daerah	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
1.8 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026	16
2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Banten	16
2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Banten	16
2.1.3 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	17
2.1.4 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten	17
2.2 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024	18
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 Capaian Kinerja	57
3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	59
3.1.2 Capaian Kinerja di Bandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	60
3.1.3 Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2023 - 2026.....	62
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	64

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024 Setda ..	64
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Tahun 2024	70
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	72
3.2 Realisasi Anggaran	87
BAB IV PENUTUP	91
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	92
Lampiran-lampiran	
1) Perjanjian Kinerja	
2) Surat Pernyataan Telah Di Reviu	
3) Piagam Penghargaan Mitra Plaza Banten dalam Mewujudkan UMKM Go Digital (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provinsi Banten)	
4) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-2 Nasional Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi (Biro Hukum)	
5) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-4 Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten Tingkat Provinsi (Biro Hukum)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas AKIP Setda tahun 204	12
Tabel 2.1	Perubahan Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	20
Tabel 2.2	Rincian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	26
Tabel 2.3	Rincian Program dan Kegiatan Biro Hukum	29
Tabel 2.4	Rincian Program dan Kegiatan Biro Perekonomiandan Administrasi Pembangunan	31
Tabel 2.5	Rincian Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang / Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	34
Tabel 2.6	Rincian Program dan Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	38
Tabel 2.7	Rincian Program dan Kegiatan Biro Administrsi Pimpinan dan Protokol	40
Tabel 2.8	Rincian Program dan Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan	44
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	57
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024	61
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.	60
Tabel 3.1.3	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2023-2026	62
Tabel 3.1.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional	63
Tabel 3.1.5	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2024	65

Tabel 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Banten Tahun 2024	70
Tabel 3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	73

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	7
Tabel 1.2 Pohon Kinerja	9
Tabel 1.3 Cascading	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Otonomi Daerah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, Penyelenggaraan Otonomi sebagaimana dibuat dalam undang-undang tersebut akan jauh demokratis dan memiliki kewenangan yang luas dengan pemberian sumber daya nasional dan pembagian keuangan yang proporsional dan adil, hal ini tentu saja akan mengakibatkan adanya kinerja pemerintah yang didasarkan pada akuntabilitas, responsivitas dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan barang dan jasa pemerintah selain dari adanya desain kualitas prima bagi Produk Pemerintah Daerah menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan Sumber daya dan Pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu, Akuntabilitas juga merupakan Instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan evaluasi kinerja program, kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun 2024 ini disusun

sebagai bagian Integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan kegiatan satuan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah wujud implementasi pengendalian manajemen yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan program tugas pembantuan, Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja perencanaan tahunan terhadap Visi, Misi, Strategi dan sasaran program kegiatan yang tertuang dalam perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Lampiran I disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 2. Biro Hukum.
- c. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan membawahkan:
 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 2. Biro Umum dan Perlengkapan;
 3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Pengadaan/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- e. Kepala Bagian Protokol; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Susunan organisasi Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah;
- e. Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Tatalaksana;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- e. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- F. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi : Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai tercantum dalam pasal 15 ayat (2) berbunyi : point (a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, point (b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, point (c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, point (d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah, dan point(e) pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, point (f) pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pada ayat (3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) antara lain Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan, pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pimpinan, umum dan organisasi.

Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta kebijakan administrasi pembangunan.

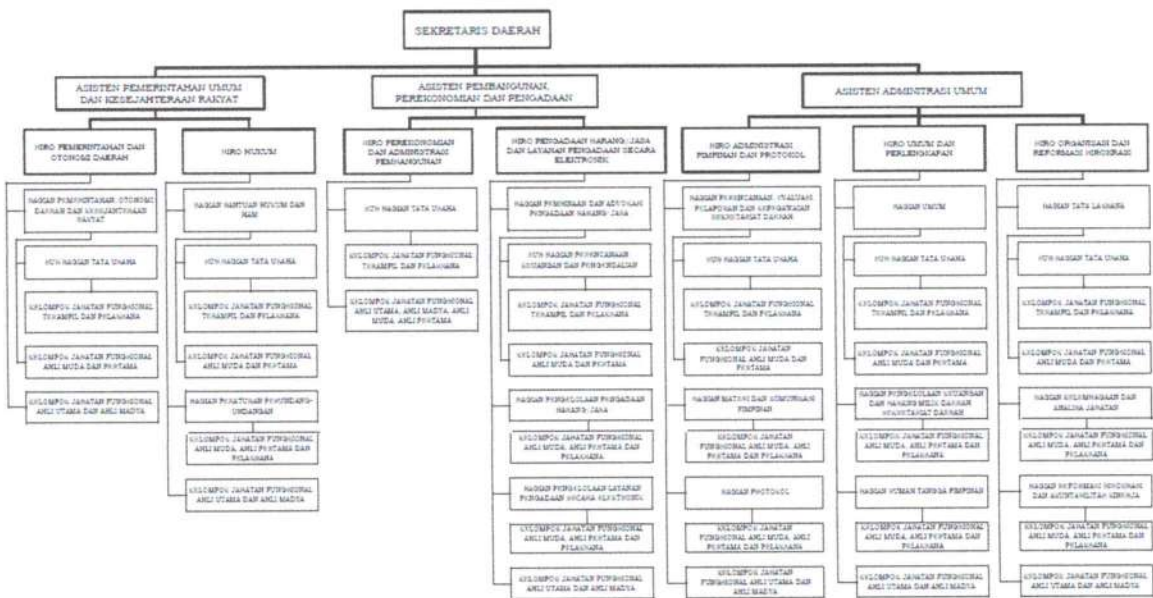
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol.

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta Rumah Tangga Pimpinan.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Sumber Data : Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2022

1.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah

Permasalahan yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2024 saat ini antara lain :

1. Belum Optimalnya Pengimplementasian SAKIP Daerah.
2. Belum optimalnya penyederhanaan produk hukum daerah.
3. Kerjasama daerah pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dilakukan hanya sebatas Kerjasama dalam negeri saja.
4. Belum optimalnya pengelolaan BLUD.
5. Belum optimalnya implementasi standar pelayanan public.
6. Belum optimal Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN.
7. Belum optimalnya hasil rumusan kebijakan yang dikeluarkan Biro untuk mendukung kebijakan Provinsi.

Aspek strategis merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan Sekretaris Daerah dengan 12 indikator dan target yang terukur. Dengan demikian aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dengan 1 indikator sasaran.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kebijakan Daerah dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah dengan 1 indikator sasaran

- Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 8 : Menigkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Kelembangaan Yang Terukur dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah) dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda dengan 1 indikator sasaran

1.6 Peta Probis Sekretariat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep-73-Huk/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Banten bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis. Untuk Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretarais Daerah Provinsi Banten Nomor : 60/Kep-59-Adpimpro/2023 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Banten



PETA RELASI SEKRETARIAT DAERAH



1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas AKIP Setda tahun 2023 dan hasil yang telah diperoleh sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas AKIP Setda tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi	Eviden
1	a. Menyusun Crosscutting dalam dokumen perencanaan kinerja; b. Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait dengan penyusunan Crosscutting dimaksud.	a. Melaksanakan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja baru Sekretariat Daerah (didalamnya terdapat Crosscutting); b. Melakukan koordinasi menyusun Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja baru Sekretariat Daerah	a. Telah menyusun Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja baru, namun hanya lingkup Biro - Dokumen Pohon Kinerja Baru Biro-biro - Dokumen Cascading Kinerja Baru Biro-biro b. Telah melaksanakan Koordinasi Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja baru - Dokumentasi - Daftar Hadir	Telah tersedia (pada google drive)
2	Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait dengan aplikasi pengukuran kinerja yang digunakan pada tahap aspek perencanaan kinerja/pembobotan kinerja, proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja;	Melakukan Desk Aplikasi Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dengan Pendamping Bappeda	Telah dilaksanakannya Perencanaan Kinerja/Pembobotan Kinerja, Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja menggunakan Aplikasi : - Dokumen Pembobotan Kinerja - Dokumen Berita Acara Evaluasi Kinerja Bulanan dan Triwulanan Tahun 2024	Telah tersedia (pada google drive)
3	a. Dapat menggunakan hasil Monev triwulanan (sebagai salah satu alat dalam mengukur capaian kinerja organisasi/individu) serta Alat Pengukuran Kinerja Lainnya sebagai dasar dalam melakukan penempatan/penghapusan Jabatan, baik struktural maupun fungsional serta dapat digunakan dalam	Menyusun alat ukur dalam rangka pelaksanaan Mutasi/Pemindahtugasan Pegawai di Unit Kerja mengacu pada hasil Evaluasi Kinerja Individu.(Surat Usulan/Surat Rekomendasi) Indikator pengukuran kinerja dalam melakukan pemindahan atau mutasi pegawai	Dokumen penyusunan alat ukur pencapaian kinerja berupa hasil monev triwulanan serta surat usulan mutasi pegawai Nota Dinas Permohonan serta Hasil	Telah tersedia (pada google drive) Telah tersedia (pada google drive)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi	Eviden
	melakukan penyesuaian (Refocusing) Organisasi, b. Melakukan koordinasi dengan Badan Kegawayaan Daerah (BKD) serta Biro Organisasi & Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten terkait dengan penempatan/penghapusan Jabatan maupun penyesuaian (Refocusing) Organisasi dimaksud.	Melakukan koordinasi dengan BKD serta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terkait dengan penempatan pegawai dan refocusing organisasi	Koordinasi	
4	a. Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat mengembangkan inovasi sendiri dengan membuat aplikasi terkait dengan pelaksanaan evaluasi dimaksud, baik yang berbasis teknologi informasi (web, dll) maupun dengan aplikasi yang sederhana, atau mengintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada; b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo serta perangkat daerah lainnya (Bappeda, dll), terkait dengan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Mengupload Dokumen SAKIP pada Website OPD Membuat Template isian Laporan Monev Triwulanan Tahun 2024 Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Bappeda terkait penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Schreen shoot hasil upload dokumen Sakip Template isian Laporan Monev Triwulanan Tahun 2024 Nota Dinas Permohonan serta Hasil Koordinasi	Telah tersedia (pada google drive) Telah tersedia (pada google drive) Telah tersedia (pada google drive)
5	Agar Laporan Kinerja (LKIP) yang telah dibuat menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan	Saran perbaikan Kinerja per Sasaran Strategis	Dokumen Saran perbaikan Kinerja per Sasaran Strategis (tertuang dalam dokumen LKIP)	Telah tersedia (pada google drive)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Progres Atas Rencana Aksi	Eviden
6	kinerja); Dapat memberikan apresiasi penghargaan didalam internal perangkat daerah atas pencapaian kinerja yang telah berhasil dicapai:	1. Masing-masing biro membuat tim penilai pegawai terbaik 2. Membuat Tim Penilai Pegawai Terbaik Sekretariat Daerah	1. SK Tim penilai pegawai terbaik masing masing-masing Biro 2. Sertifikat Penghargaan Pegawai Terbaik 3. Dokumentasi Pegawai Terbaik 4. Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik Sekretariat Daerah diberikan pada Akhir Tahun.	Telah tersedia (pada google drive)
7	Melakukan evaluasi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah selaku Kepala OPD Setda;	Melakukan koordinasi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dengan Bappeda Provinsi Banten;	Nota Dinas Permohonan serta Hasil Koordinasi	Telah tersedia (pada google drive)
8	Dalam upaya perbaikan capaian target kinerja, setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan internal, dengan melibatkan pejabat eselon 2 beserta seluruh jajarannya, minimal setiap 1 bulan sekali atau per Triwulan;	Rapat Koordinasi Internal yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah per Triwulan Tahun 2024	Telah Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah per Triwulan Tahun 2024 - Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan Internal per Triwulan Tahun 2024	Telah tersedia (pada google drive)
9	Agar Sekretariat Daerah (Biro Adpimpro) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah selaku kepala OPD Setda, minimal sebulan sekali atau per Triwulan.	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja pada Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024	Telah Melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja pada Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024 - Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 - Undangan Rapat Koordinasi - Daftar Hadir - Dokumentasi	Telah tersedia (pada google drive)

1.8 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 mengacu pada Peraturan Kementrian PAN RB RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan perubahan rencana strategis, ringkasan/ikhtisar perubahan rencana strategis, perubahan rencana kerja dan perubahan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

- 1) Perubahan Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan Telah Di Reviu
- 3) Berita Acara Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
- 4) Lain – lain

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023-2026

Sebagai sebuah Instansi Sektor Publik, Pemerintah Provinsi Banten mempunyai Rencana Strategis dan Perubahannya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul/rencana strategis Pemerintah Provinsi Banten yang mencakup Visi/Misi Prioritas Daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bab ini.

2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026, berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu visi Pembangunan Provinsi Banten 2005-2025.

Visi yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi Provinsi Banten yang akan dicapai selama empat tahun mendatang (2023-2026) sesuai dengan visi pembangunan Banten tahun 2005-2025, yaitu:

"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Banten

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan visi, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi Provinsi Banten 2023-2026 tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas**
- 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan**

- 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari**
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.**

2.1.3 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1-4 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Banten tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada perangkat Daerah;
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1.4 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah diterapkan atau merupakan tujuan antara/dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran dapat terpenuhi dan berhasil.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasarnya.

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator nilai indeks reformasi

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan yang terukur dengan indikator nilai indeks kelembagaan
4. Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan indikator nilai indeks kepatuhan pelayanan publik
5. Meningkatnya kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi
6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah dengan indikator indeks kualitas kebijakan
7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa
8. Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan dengan indikator Persentase rumusan administrasi pembangunan yang diimplementasikan
9. Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan yang diimplementasikan
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah dengan indikator Persentase realisasi pelayanan pimpinan daerah
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda dengan indikator Persentase realisasi pelayanan SETDA

2.2 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Perubahan Rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 terjadi pada target indikator kinerja serta pendanaannya namun untuk sasaran strategis dan indikator kinerja tetap mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026, yang memiliki 12 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja yang diampu oleh 7 unit kerja (Biro) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sasaran strategis dan indikator kinerja yang

mengalami perubahan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	86,55	88,59	Target disesuaikan dengan capaian Tahun 2023, karena target tahun 2024 dibawah capaian tahun 2023
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84,2	
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	82,87	91,16	

Sasaran Strategis dan indikator kinerja, target Tahun 2024 serta rumus perhitungan, perubahan target kinerja seperti tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Perubahan Target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	Semua Biro
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks kelembagaan	Perrgkat komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Nilai	84,2	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	S = Jumlah Komponen Indikator Variabel Penilaian	Nilai	91,16	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
4	Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Penilaian dari Kementerian PAN RB	Nilai	11,17	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat Penilaian : Unggul (91,00-100) Sangat Baik (80,00-90,99) Baik (65,00-80,99) Cukup (50,00-64,99) Kurang (< 50)	Nilai	71	Biro Hukum
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Varang dan Jasa sesuai SE Kepala LKPP No. 4/2021 Tentang Indeks Tata Kelola PBJ	Nilai	88,59	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Dokumen Kebijakan perekonomian yang di implementasikan / target dokumen yang dirumuskan X 100%	Persen	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
8	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Dokumen Kebijakan Administrasi Kebijakan yang disahkan / ϕ target dokumen yang dirumuskan X 100% Dokumen Rekomendasi Pengendalian Administrasi Kebijakan yang disampaikan / ϕ target dokumen dokumen yang disusun X 100%	Persen	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
9	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Dokumen Kebijakan KESRA yang di implementasikan / ϕ target dokumen yang dirumuskan X 100%	Persen	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
10	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil penilaiaandokumen LPPD pemerintah daerah yang dinilai oleh Kemendagri berdasarkan status kinerja penyelenggaraan daerah 5 (lima) klasifikasi 1-1,8 (sangat rendah) 1,81-2,60 (rendah) 2,61-3,40 (sedang) 3,41-4,20 (tinggi) 4,21-5 (sangat tinggi)	Skor/ Nilai	4,29	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	ϕ Realisasi kegiatan pelayanan pimpinan / ϕ target kegiatan pelayanan pimpinan X 100%	Persen	100	Biro Administrasi Pimpinan Dan Protokol
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase realisasi pelayanan SETDA	ϕ Realisasi kegiatan pelayanan Setda / ϕ target kegiatan pelayanan Setda X 100%	Persen	100	Biro Umum Dan Perlengkapan

Untuk menunjang pencapaian target kinerja sasaran strategis, disampaikan program dan kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2024 mengampu tiga sasaran strategis dan tiga indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan;
3. Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan indikator kinerja Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menjalankan 3 program dan 11 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **25.354.482.730,-** (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.2.

b. Biro Hukum

Tahun 2024 Biro Hukum mengampu dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan

Dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut Biro Hukum menjalankan 2 program dan 7 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **2.788.197.136,-** (Dua Milyar Tujuh

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.3.

c. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Tahun 2024 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengampu tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah dengan indikator kinerja Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan;
3. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan;

Dalam upaya mencapai target kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menjalankan 3 program dan 9 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **4.181.549.090,-** (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.4.

d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE mengampu dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam upaya mencapai target kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE menjalankan 2 program dan 9 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp.

3.728.943.760,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.5.

e. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Tahun 2024 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengampu tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur dengan indikator kinerja Indeks kelembagaan;
3. Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik dengan indek kinerja Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi;
4. Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi.

Dalam upaya mencapai target Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi menjalankan 2 program dan 7 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **2.582.212.902,-** (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Sasaran, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.6.

f. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

pada tahun 2024 Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mengampu dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah dengan indikator kinerja Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah.

Dalam upaya mencapai target Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol menjalankan 1 program dan 7 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **10.039.139.550,-** (Sepuluh Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.7.

g. Biro Umum dan Perlengkapan

pada tahun 2024 Biro Umum dan Perlengkapan mengampu dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja sebagai berikut :

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda dengan indikator kinerja Persentase realisasi pelayanan SETDA.

Dalam upaya mencapai target Biro Umum dan Perlengkapan menjalankan 1 program dan 10 kegiatan, yang didukung oleh APBD Provinsi Banten sejumlah Rp. **203.259.941.146,-** (Dua Ratus Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.2

Rincian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100 Persen	100 Persen	2.550.000.000,00	3.742.315.480,00	3.336.773.480,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	74.854.000,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	53.600.000,00	30.854.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	11.400.000,00	9.000.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)			100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	101.350.000,00
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1,00 Unit	1,00 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	8.850.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Berserba Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserba Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
						Tabel 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	1 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	700.000.000,00	608.786.000,00	536.102.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	44.536.000,00	44.536.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	327.316.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)			100 Persen	100 Persen	1.500.000.000,00	2.783.529.480,00	2.574.467.480,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	2.783.529.480,00	2.574.467.480,00
						100 Persen	100 Persen	1.900.000.000,00	1.840.000.000,00	1.593.966.000,00
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			6 Dokumen	6 Dokumen	450.000.000,00	350.000.000,00	278.222.000,00
				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	70.000.000,00	28.320.000,00
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	70.000.000,00	33.500.000,00
				Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	216.402.000,00
		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			100 Persen	100 Persen	800.000.000,00	900.000.000,00	791.844.000,00
				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	400.000.000,00	341.614.000,00
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	150.230.000,00
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			100 Persen	100 Persen	650.000.000,00	550.000.000,00	523.900.000,00
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	10 Dokumen	10 Dokumen	510.000.000,00	410.000.000,00	383.900.000,00
				Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
										16.498.743.250,00
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian realisasi Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual			100 Persen	100 Persen	16.673.000.000,00	19.940.019.130,00	15.876.563.250,00
						100 Persen	100 Persen	15.800.000.000,00	19.187.019.130,00	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
						Tangai 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikabai	1 Unit	1 Unit	4.500.000.000,00	5.137.019.130,00	5.024.019.130,00
				Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga	11.300.000.000,00	14.050.000.000,00	10.852.544.120,00
						6 Dokumen	6 Dokumen	420.000.000,00	300.000.000,00	222.180.000,00
		Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	100.000.000,00	65.300.000,00
				Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	100.000.000,00	82.820.000,00
				Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	100.000.000,00	74.060.000,00
		Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	7 Dokumen	7 Dokumen	453.000.000,00	453.000.000,00	400.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	3 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	3 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	73.000.000,00	73.000.000,00	20.000.000,00

Tabel 2.3

Rincian Program dan Kegiatan Biro Hukum

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					-	100 Persen	518.881.700,00	481.171.850,00	473.099.076,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Hukum)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	100 persen	84.290.300,00	80.028.000,00	96.252.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen	3,00 Dokumen	13.100.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.499.900,00	2.472.000,00	1.948.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.499.900,00	2.472.000,00	1.948.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.499.900,00	2.072.000,00	1.588.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1,00 Laporan	2.499.900,00	1.756.000,00	1.756.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Laporan	1,00 Laporan	58.690.800,00	62.804.000,00	81.044.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	100 Persen	4.000.200,00	4.000.200,00	4.000.200,00
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3,00 Laporan	3,00 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah (Biro Hukum)			-	100 Persen	30.750.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
					Jumlah Paket Pakajian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0,00 Paket	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00 Orang	4,00 Orang	30.750.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00 Orang	0,00 Orang	0,00	0,00	0,00
						-	100 persen	176.183.200,00	142.285.650,00	142.285.650,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Penyediaan Pelatihan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelatihan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	78.837.200,00	66.276.000,00	66.276.000,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	42.346.000,00	34.878.000,00	34.878.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Laporan	1,00 Laporan	55.000.000,00	41.131.650,00	41.131.650,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	100 persen	223.668.000,00	224.108.000,00	199.811.226,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.430.400,00	1.056.000,00	1.056.000,00
						1,00 Laporan	1,00 Laporan	222.227.600,00	223.052.000,00	198.755.226,00
						-		3.164.841.300,00	2.364.841.300,00	2.315.096.060,00
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keseluruhan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional									
		Facilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	-	100 Persen	1.697.012.000,00	1.397.012.000,00	1.367.500.060,00
				Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	30 Dokumen	16 Dokumen	750.011.500,00	644.199.300,00	618.409.160,00
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	50 Dokumen	50 Dokumen	149.988.500,00	149.988.500,00	146.838.500,00
				Facilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	6 Dokumen	4 Dokumen	257.012.000,00	193.006.200,00	206.766.400,00
						60,00 Dokumen	60,00 Dokumen	500.000.000,00	409.818.000,00	395.486.000,00
		Facilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Bantuan Hukum	Facilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Kasus	-	100 Persen	1.467.829.300,00	967.829.300,00	947.596.000,00
						16,00 Kasus	16,00 Kasus	735.000.000,00	485.000.000,00	475.000.000,00
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	34,00 Kasus	26 Kasus	732.829.300,00	482.829.300,00	472.596.000,00

Tabel 2.4

Rincian Program dan Kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					-	100 Persen	2.297.881.450,00	2.308.243.956,00	2.116.524.673,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)			-	100 Persen	109.297.139,00	93.589.139,00	56.253.139,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	55.417.139,00	55.417.139,00	30.817.139,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	11.160.000,00	4.160.000,00	6.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	8.660.000,00	5.196.000,00	5.196.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	6.160.000,00	4.160.000,00	4.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	5.000.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00 Laporan	12,00 Laporan	6.620.000,00	4.216.000,00	1.080.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	4,00 Laporan	16.280.000,00	16.280.000,00	5.000.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)			-	100 Persen	21.685.000,00	21.685.000,00	15.007.000,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	7.410.000,00	7.410.000,00	5.684.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	2,00 Laporan	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1,00 Laporan	18,00 Laporan	4.350.000,00	4.350.000,00	2.088.000,00
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.825.000,00	2.825.000,00	1.480.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.825.000,00	2.825.000,00	1.480.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Ekbang)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	undefined	100 Persen	515.448.487,00	381.924.487,00	394.832.204,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	196.827.000,00	196.827.000,00	219.537.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	15.097.000,00	15.097.000,00	15.097.000,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	57.200.000,00
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Laporan	1,00 Laporan	30.000.487,00	30.000.487,00	35.720.487,00
				Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	108.524.000,00	50.000.000,00	26.875.000,00
						1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	5.000.000,00	40.000.000,00	40.401.717,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) [deleted]			-	100 Persen	1.851.250.824,00	1.811.045.330,00	1.850.432.330,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	24.000.000,00	183.794.506,00	23.181.506,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	1.627.250.824,00	1.627.250.824,00	1.627.250.824,00
	Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketensagakerjaan					-	100 Persen	2.046.680.550,00	1.580.000.000,00	1.492.371.417,00
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			-	100 Persen	200.000.000,00	510.712.000,00	448.120.667,00
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	100.000.000,00	470.712.000,00	412.270.667,00
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	35.850.000,00
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			-	100 Persen	407.878.050,00	560.000.000,00	550.000.000,00
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	7,00 Dokumen	7,00 Dokumen	227.878.050,00	480.000.000,00	475.230.000,00
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	180.000.000,00	80.000.000,00	74.770.000,00
						-	100 Persen	1.438.602.500,00	509.288.000,00	494.250.750,00
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			-	100 Persen	1.150.000.000,00	349.288.000,00	345.221.750,00
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.150.000.000,00	349.288.000,00	345.221.750,00
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	142.824.500,00	105.000.000,00	98.829.000,00
						-	100 Persen	1.438.602.500,00	509.288.000,00	494.250.750,00
						-	100 Persen	1.438.602.500,00	509.288.000,00	494.250.750,00
						-	100 Persen	1.438.602.500,00	509.288.000,00	494.250.750,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
				Usaha Mitik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	145.778.000,00	55.000.000,00	50.200.000,00
PROGRAM KEBUJUKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi					-	100 Persen	1.000.000.000,00	1.198.700.000,00	574.133.000,00
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	-	100 Persen	550.000.000,00	956.700.000,00	361.233.000,00
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	3.00 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	556.700.000,00	156.233.000,00
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2.00 Laporan	2.00 Laporan	150.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00
						2.00 Laporan	2.00 Laporan	150.000.000,00	125.000.000,00	90.000.000,00
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			-	100 Persen	450.000.000,00	240.000.000,00	212.900.000,00
				Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disetujui	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	59.500.000,00
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.00 Laporan	2.00 Laporan	150.000.000,00	80.000.000,00	73.400.000,00
				Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	200.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Tabel 2.5

Rincian Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jsa dan LPSE

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			-	100 Persen	2.578.551.000,00	2.627.903.746,00	2.529.666.560,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	100 Persen	144.850.000,00	63.712.000,00	63.696.640,00
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	104.747.600,00	20.600.000,00	20.600.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.830.800,00	3.660.000,00	3.560.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.916.400,00	3.660.000,00	3.560.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.416.400,00	3.340.000,00	3.340.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.886.400,00	3.960.000,00	3.960.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.866.800,00	21.528.000,00	21.528.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3 Laporan	5.175.600,00	6.944.000,00	6.928.640,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			-	100 Persen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.356.000,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
				Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		18 Laporan	18 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
				Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	856.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	100 Persen	180.000.000,00	42.000.000,00	32.474.000,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		3.00 Unit	0 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 Paket	0 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		8 Orang	3 Orang	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)		35 Orang	35 Orang	28.000.000,00	22.000.000,00	12.474.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penyediaan Peralatan dan Perengkingan Kantor		-	100 Persen	336.201.000,00	452.665.745,00	421.600.000,00
				Penyediaan Peralatan dan Perengkingan Kantor		2 Paket	2 Paket	180.000.000,00	80.000.000,00	90.770.000,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	358.696.746,00	276.830.000,00
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	2.201.000,00	0,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)			-	100 Persen	1.907.000.000,00	2.019.000.000,00	2.001.541.920,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	73.831.200,00	60.763.200,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.883.000.000,00	1.945.168.800,00	1.940.776.720,00
PROGRAM KEBLIUKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan B. Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		-	25,43 Nilai 30 Nilai 31,11 Nilai	1.994.561.200,00	987.319.200,00	1.199.275.200,00
						-	100 Persen	450.000.000,00	165.030.000,00	165.030.000,00
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
				Peaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	35.030.000,00	35.030.000,00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		-	100 Persen	994.561.200,00	648.699.200,00	846.425.200,00
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	674.561.200,00	556.023.200,00	706.481.200,00
				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						
				Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	50.486.000,00	85.586.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	32.190.000,00	54.355.000,00
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			-	100 Persen	550.000.000,00	173.590.000,00	187.820.000,00
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang	40 Orang	180.000.000,00	50.036.000,00	50.036.000,00
				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	80.172.000,00	94.402.000,00
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	43.382.000,00	43.382.000,00

Tabel 2.6

Rincian Program dan Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dan Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Provinsi					100 Persen	100 Persen	624.068.500,00	588.968.430,00	499.497.402,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)			100 Persen	100 Persen	19.700.000,00	43.646.000,00	20.900.000,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	29.046.000,00	6.300.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ke tercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)			-	100 Persen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	900,00	900,00	900,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	900,00	900,00	900,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan	100 Laporan	900,00	900,00	900,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 Laporan	100 Laporan	900,00	900,00	900,00
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 Dokumen	100 Dokumen	900,00	900,00	900,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat			-	100 Persen	53.600.000,00	50.484.000,00	5.300.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024
									RKPD Pendanaan 2024
			Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Unit 4 Orang	1 Unit 4 Orang	4.300.000,00 46.184.000,00	4.300.000,00 1.000.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)			-	100 Persen	178.044.030,00	132.115.682,00
				Penyediaan Peralatan dan Prasarana Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	59.996.600,00	51.818.572,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.968.400,00	34.934.000,00
				Penyediaan Berang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.679.225,00	11.790.682,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19.350.000,00	18.400.000,00
				Penelausahan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penelausahan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	37.559.805,00	12.600.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)			-	100 Persen	372.719.970,00	372.719.248,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	372.719.970,00	339.249.648,00
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan Persentase cakupan kegiatan ketataaksanaan dan pelayanan publik Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja					100 Persen	100 100 100* Persen % Persen	2.895.000.000,00	2.210.000.000,00
		Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			100 Persen	100 Persen	1.450.000.000,00	930.000.000,00
				Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	520.000.000,00	289.020.000,00
				Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	275.000.000,00
				Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	530.000.000,00	295.000.000,00
		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			100 Persen	100 Persen	1.445.000.000,00	1.219.200.000,00
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	268.755.100,00	165.200.000,00
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000,00	360.000.000,00
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	191.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
				Pengelolaan Tataleakhsana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	291.244.900,00	220.000.000,00	203.000.000,00
				Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	375.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
				Pengabdian dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.248.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)							
				Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	209.085.800,00	209.026.000,00	209.026.000,00
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	239.204.200,00	183.556.400,00	175.356.400,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	8.412.800,00	8.412.800,00	8.412.800,00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	26 Orang	473.788.000,00	314.204.200,00	310.176.200,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	36.266.800,00	33.744.000,00	14.784.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)							
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
						100 Persen	100 Persen	4.483.381.700,00	4.100.208.950,00	3.941.194.150,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol)							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.483.381.700,00	4.100.208.950,00	3.941.194.150,00
						100 Persen	100 Persen	4.923.877.900,00	3.676.800.000,00	3.236.965.000,00
		Facilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							
				Penyediaan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	460.000.000,00	414.335.000,00
				Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	2.600.580.000,00	2.016.800.000,00	1.622.660.000,00
				Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	1.723.287.900,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
		Facilitasi Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Keprotokolan							
				Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100 Persen	100 Persen	2.050.000.000,00	1.450.000.000,00	1.300.000.000,00
						12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
				Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil/Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Pengalcaan Hubungan Kepradikolan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00
				Pengelolaan Hubungan Kepradikolan		12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Tabel 2.8

Rincian Program dan Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APSD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persetase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA Persentase Capaian Fasilitas Tata Usaha Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persetase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)			-	100 100,00 100,00 100 Persen persen %	215.562.763.400,00	201.979.912.248,00	203.359.941.146,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	88.000.000,00	88.000.000,00	123.000.000,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	19.500.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	17.500.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1,00 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	18.500.000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja SKPD dan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan)			-	100 Persen	132.332.028.000,00	131.162.723.827,00	111.353.061.000,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00 Orang/ Bulan	14,00 Orang/ Bulan	129.647.958.000,00	128.966.153.827,00	109.269.586.000,00
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.279.070.000,00	2.279.070.000,00	1.730.975.000,00
				Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	350.000.000,00	282.500.000,00	297.500.000,00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,00 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				Pengelabian dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.00 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perangkapan)			-	100 Persen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	28.700.000,00
				Pergantian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pergantian Barang Milik Daerah SKPD	200.00 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	33.240.000,00
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
				Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	27.060.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perangkapan)			-	100 Persen	450.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25.00 Orang	19.00 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.00 Orang	35 Orang	300.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perangkapan)			-	100 Persen	15.971.264.686,00	10.642.074.489,00	12.712.252.386,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	550.807.000,00	440.645.600,00	540.645.600,00
				Penyediaan Peralatan dan Perangkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perangkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	746.850.000,00	732.487.880,00	1.030.410.280,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	273.830.300,00	219.071.440,00	219.071.440,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	3.387.563.906,00	2.209.087.125,00	2.711.567.125,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1.00 Paket	1.00 Paket	595.042.000,00	480.785.700,00	710.581.000,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.446.258.450,00	5.082.268.444,00	5.782.268.444,00
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.500.000.000,00	962.917.250,00	1.162.917.250,00
				Pendatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	420.875.000,00	474.831.250,00	514.831.250,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perencanaan)			-	100 Persen	3.972.258.701,00	845.049.850,00	9.559.970.075,00
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3,00 Unit	2 Unit	2.091.253.701,00	0,00	5.820.000.000,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	300.000.000,00	251.522.350,00	251.522.350,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	283,00 Unit	250 Unit	1.500.000.000,00	513.307.250,00	3.407.527.475,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00 Unit	1,00 Unit	80.965.000,00	80.820.250,00	80.820.250,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah	[deleted] Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perencanaan) [deleted]			-	100 Persen	24.335.709.420,00	22.045.682.020,00	23.654.693.220,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	1,00 Laporan	200.000.000,00	180.000.000,00	230.000.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	3.100.200.000,00	2.800.200.000,00	3.110.250.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	2.304.618.000,00	1.479.474.400,00	2.279.474.400,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	18.730.891.420,00	17.586.007.620,00	18.034.958.820,00
						-	100 Persen	14.896.457.635,00	13.265.657.585,00	21.476.860.985,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perencanaan)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsuran Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perencanaan)							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18,00 Unit	20 Unit	892.640.000,00	989.084.000,00	1.532.048.165,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	280,00 Unit	222 Unit	2.470.000.000,00	3.547.896.000,00	6.815.894.235,00
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	329,00 Unit	0 Unit	43.750.000,00	0,00	0,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	371,00 Unit	398 Unit	275.432.000,00	205.574.000,00	424.916.000,00
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2,00 Unit	0 Unit	300,00	0,00	0,00
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5,00 Unit	2.776.482.336,00	1.273.629.835,00	4.055.629.835,00
				Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5,00 Unit	8.197.180.000,00	7.057.744.000,00	8.467.682.000,00
				Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5,00 Unit	240.973.000,00	180.729.750,00	180.729.750,00

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)				100 Persen	14.199.998.677,00	16.188.143.677,00	16.138.143.677,00
			Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum dan Perlingkapan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,00 Orang g/Bulan	12,00 Orang g/Bulan	11.259.653.677,00	14.079.653.677,00	14.079.653.677,00
				Penyediaan Pakiaian Dinas dan Anibut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Anibut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	814.150.000,00	488.490.000,00	488.490.000,00
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4,00 Orang	2 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,00 Orang/ Bulan	12,00 Orang/ Bulan	2.005.785.000,00	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00
		Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlingkapan)				100 Persen	9.222.476.300,00	7.376.980.800,00	7.976.980.800,00
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	6.500.000.000,00	5.200.000.000,00	5.700.000.000,00
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	300,00	0,00	0,00
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	2.722.476.000,00	2.176.980.800,00	2.276.980.800,00

2.3 Perubahan Penjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Pada tahun anggran 2024 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Perjanjian Kinerja Kepala Biro mengalami perubahan namun perubahan tersebut hanya terjadi pada besaran anggaran dikarenakan adanya optimalisasi anggaran, serta target kinerja yang mengalami perubahan terutama pada target kinerja murni yang lebih kecil dari capaian kinerja tahun sebelumnya, pada beberapa kegiatan anggaran mengalami penurunan atau penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang berkembang (Perjanjian Kinerja Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Terlampir).

Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Daerah masih terdapat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang merupakan kinerja lintas Perangkat Daerah (Program, Kegiatan dan Pendanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Berikut disampaikan data perbandingan Target Kinerja Anggaran Murni dengan Target Kinerja Anggaran Perubahan Tahun

2024 sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten seperti pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
 Target Perjanjian Kinerja Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2024
 Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,29	4,29	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD)

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.742.315.480	3.336.773.480	(405.542.000)	Berkurang
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.840.000.000	1.593.966.000	(246.034.000)	Berkurang
3	Program Kesejahteraan Rakyat	19.940.019.130	20.423.743.250	483.724.120	Bertambah
Jumlah		25.522.334.610	25.354.482.730	(167.851.880)	Berkurang

2. Kepala Biro Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	71	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	481.172.850	473.099.076	(8.072.774)	Berkurang
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.364.841.300	2.315.098.060	(49.743.240)	Berkurang
Jumlah		2.846.013.150	2.788.197.136	(57.8169.014)	Berkurang

Keterangan : Target Kinerja tetap, Perubahan pengurangan anggaran

3. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa dan LPSE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	86,55	88,59	Target disesuaikan dengan capaian Tahun 2023, karena target tahun 2024 dibawah capaian tahun 2023

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.627.908.746	2.529.668.560	(98.240.186)	Berkurang
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang	987.319.200	1.199.275.200	211.956.000	Bertambah
Jumlah		3.615.227.946	3.728.943.760	113.715.814	Bertambah

4. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di Implementasikan	%	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di Implementasikan	%	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.305.418.956	2.115.044.673	(190.374.283)	Berkurang
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.580.000.000	1.492.371.417	(87.628.583)	Berkurang
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.196.700.000	574.133.000	(622.567.000)	Berkurang
Jumlah		5.082.118.956	4.181.549.090	(900.569.866)	Berkurang

5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84,2	Target tidak berubah sesuai Dokumebn Perubahan RKPD 2024
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	82,87	91,16	Target tidak berubah sesuai Dokumen Perubahan RKPD 2024
4	Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17	11,17	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	603.464.930	503.992.902	(99.472.028)	Berkurang
2	Program Penataan Organisasi	2.210.000.000	2.078.220.000	(131.780.000)	Berkurang
	Jumlah	2.813.464.930	2.582.212.902	(231.252.028)	Berkurang

6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026

No	Program	Anggaran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.819.147.350	10.039.139.500	(780.007.800)	Berkurang
	Jumlah	10.819.147.350	10.039.139.500	(780.007.800)	Berkurang

7. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Murni	Target Perubahan	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Setda)	Nilai	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan SETDA	%	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumebn Rencana Pembangunan (RPD) 2023-2026

No	Program	Anggran		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	201.979.912.248	203.259.941.146	1.280.028.898	Bertambah
	Jumlah	201.979.912.248	203.259.941.146	1.280.028.898	Bertambah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten, baik capaian kinerja sasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2023 maupun capaian kinerja keuangannya. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam mengukur kinerja sasaran strategis yang didukung oleh pembiayaan program dan kegiatan, indikator yang digunakan adalah indikator *absolut*. Capaian *absolut* dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan pendukung, oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan dalam mengukur keberhasilan suatu sasaran strategis.

3.1 Capaian Kinerja Sekretaraiat Daerah Tahun 2024

Pada sub bab akuntabilitas kinerja ini diuraikan akuntabilitas kinerja sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja tahun 2024.

Kemudian hal lain yang menjadi dasar laporan akuntabilitas ini

tidak melaporkan capaian kinerja sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah adalah bahwa Sasaran Strategis serta indikator kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan sasaran strategis daerah yang program dan kegiatan serta pendanaanya terdapat di Perangkat Daerah Teknis.

Selain akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diinformasikan pula capaian kinerja keuangan pada tahun 2024 yang mendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Laporan capaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang di ampu oleh biro-biro memuat analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Hasil analisis tersebut dapat dilihat dibawah ini :

3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Pengampu
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	78,10	111,57	Semua Biro (Nilai SAKIP Setda Tahun 2024) kinerja tahun 2023
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,29	3,46	80,65	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,10	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	71.43	71.43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	133	133	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17	10.72	99,54	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan

3.1.2 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026, dibandingkan dengan tahun 2023 capaian terhadap target kinerja secara keseluruhan adanya peningkatan nilai capaian, namun ada juga beberapa indikator yang capainnya mengalami penurunan, seperti pada tabel Tabel 3.1.2 berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	85	78,96	97,50	70-80	80,25	114,64	70-80	78,10	111,57	Target tercapai namun ada penurunan capaian
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	-	-	-	60	71	118	71	66,77	94,04	Ada penurunan capaian
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	-	-	-	4,24	3,46	81,37	4,29	3,46	80,65	Ada penurunan capaian
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	80,8	88,59	109,64	86,55	89,23	103,10	Target tercapai, ada penurunan
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	89,81	89,81	100	71,43	71,43	Target tidak tercapai dan ada penurunan capaian
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	88,72	88,72	100	133	133	Target tercapai dan ada peningkatan capaian
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target Tercapai
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	-	-	-	41-60	84,2	205,37	84,2	84,2	100	Target Tercapai
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	--	-	-	81,81	91,16	111,43	91,16	91,16	100	Target Tercapai
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penguasaan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	-	-	-	10,77	10,24	95,08	11,17	10,72	99,54	Tidak tercapai, ada peningkatan capaian
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Target Tercapai

3.1.3. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2023-2026

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026, pada target kinerja Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 pada periode tahun kedua ada beberapa target yang nilainya dibawah capaian target pada tahun 2023, sehingga perlu adanya perubahan target yang disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun berikutnya, serta, perbandingan capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah seperti pada tabel Tabel 3.1.3 berikut :

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70	78,10	111,57	Semua Biro (Nilai SAKIP Tahun 2023)
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,29	3,46	80,65	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,10	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	71,43	71,43	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	133	133	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17	10,72	99,54	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
12	Meningkatnya Kuualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional/ Pemerintah Daerah Terdekat

Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional namun ada beberapa indikator yang dapat dibandingkan dengan capaian pemerintah daerah terdekat.

Tabel 3.1.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Pemerintah Daerah Terdekat

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI DKI JAKARTA	% CAPAIAN
Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4,29	3,46	80,65	3,66	85,31
Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	71	66,77	94,04	58,43	82,30

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023 Setda Provinsi Banten

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 7 Biro memiliki 3 fungsi yaitu : pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Biro-Biro telah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Namun kinerja Tujuan dan Sasaran seluruhnya belum tercapai 100%.

Pada level sasaran yang memiliki 12 indikator kinerja yang merupakan ampuan kinerja biro-biro ada beberapa indikator yang masih belum mencapai target, hal tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya sinergitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi yang belum intensif dalam mengawal kinerja OPD tahun 2024. Secara keseluruhan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 3.1.5.

Tabel 3.1.5
 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024				Tindak Lanjut	Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	73	78,10	111,57	Seluruh unit kerja aktif melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait serta melakukan pendampingan dalam menyusun perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara periodik, serta berupaya meningkatkan SDM dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan SAKIP	Perlu dikoordinasikan kembali terkait target sehubungan dengan nilai SAKIP Provinsi Banten yang masih jauh lebih kecil dengan nilai SAKIP perangkat daerah, Berupaya meningkatkan SDM dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan SAKIP	Seluruh Biro
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	Faktor penurunan nilai : 1. Bukti dukung yang diupload di sistem IKK tidak sesuai atau tidak tepat dengan instrumen pertanyaan 2. Kurangnya data, informasi dan pengetahuan yang relevan dalam proses kajian dan analisis kebijakan 3. Kurangnya peran analisis kebijakan dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan	Biro Hukum akan melakukan sosialisasi dengan OPD terkait tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dengan melibatkan peran Analis Kebijakan	Biro Hukum
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,29	3,46	80,65	1. OPD Masih kesulitan Memperoleh Data eviden, apabila harus menjelaskan By Name & By Address nya 2. OPD Kesulitan Memperoleh Data eviden, yg Bersumber dari Urusan lain atau Data dari Instansi yang lain IKK yang di Laporkan tidak sesuai	Pembinaan, Koordinasi dan Evaluasi kepada seluruh OPD akan ditingkatkan agar Target Capaian Skoring/Nilai LPPD Provinsi Banten dapat tercapai.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024				Tindak Lanjut	Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan dengan Urusan Program Dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah		
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	Rumusan kebijakan yang dihasilkan masih berupa dokumen yang berisi analisis dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah (Policy Brief) kebijakan belum sampai kepada rumusan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur	Akan diimplementasikan di Tahun 2025	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,10	Meskipun realisasi melebihi target, namun masih belum maksimalnya pelaporan setiap Perangkat Daerah untuk pemanfaatan System Pengadaan Barang dan Jasa	- Akan ditingkatkan lagi Indikator Pemanfaatan System Pengadaan agar ITKP bisa lebih optimal - Penguatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan LKPP	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	71.43	71.43	- Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang di Implementasikan menghasilkan rumusan kebijakan : 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Bank Banten dan Jamkrda Kirim DPRD 2. SK Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Air Minum - Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian yang belum menghasilkan rumusan kebijakan yang diimplementasikan - Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan yang menghasilkan Rumusan Kebijakan tentang Peluang Ketenagakerjaan Domestik - Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi	Penguatan Koordinasi dengan Bappeda, Inpektorat serta Dinas Teknsi yang berkaitan langsung dengan Bidang Perekonomian	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024				Tindak Lanjut	Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Daerah menghasilkn Police Brief sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah		
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	133	133	- Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Sebagai Bahan Evaluasi - Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan menghasilkan Kebijakan antara lain : 1. Pergub 6-2021 Tig Juknis Bankeu 2. Pergub No.6 Th 2023ttg perubahan atas Pergub no.6 th 2021 ttg juknis Bankeu 3. Pergub nomor 6 tahun 2022 tentang hibah bansos. - Pergub Nomor 55 Tahun 2022 tentang Domlak APBD 2023		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	- Tersedianya SDM kompeten pada Fasilitas Layanan Pimpinan - Terkoordinasinya Agenda Fasilitas Pimpinan dengan Stakeholder - Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Pimpinan Tepat Waktu. antara lain : 1. Penyiapan Materi Pimpinan : - Sambutan : 194 Naskah - Notulen : 109 Naskah - Materi Pimpinan : 145 Paparan. 2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan : - Press Release : 869 Dokumen Rilis	Koordinasi dengan Biro Umum Terkait Kebutuhan Kendaraan Operasional Fasilitas Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024				Tindak Lanjut	Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan		
							Infografis : 997 Infografis Tayangan Berita : 13.035 Tayangan 3. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan : Jumlah Kegiatan : 787 Fasilitasi Keprotokolan : 767 Kegiatan		
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	- Komposit yang kurang maksimal pada evaluasi kelembagaan adalah governance dan compliance - Terkait indeks kelembagaan Kempan-RB masih menggunakan parameter indikator evaluasi kelembagaan sehingga saat ini hasil indeks kelembagaan menggunakan parameter evaluasi	- Akan difokuskan perbaikan pada komposit yang masih kurang - Indikator penilaian kelembagaan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pada lokus dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, DPMPSTP dan RSUD banten masih kurang.	Perbaikan Pelayanan Terhadap Lokus Tersebut Dan Lokus Lainnya Yang Berhubungan Langsung Dengan Pelayanan Publik Di Masyarakat	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dari Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17	10,72	99,54	- pada laporan kinerja level penda belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya perbandingan dengan target pada rencana jangka menengah - laporan kinerja PD belum menyampaikan analisis per indikator kinerja - laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya	<i>Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum diinformasikan secara luas kepada publik/belum diunggah ke website Provinsi Banten, sehingga transparansi atas kinerja yang telah dilakukan belum berjalan optimal, dengan data dukung Hasil evaluasi Kementerian PAN RB berdasarkan Suratnya Nomor: B/400/AA.05/2023, tanggal 27 November 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023</i>	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024				Tindak Lanjut	Pengampu
				Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan		
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Presentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	-Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan : 20 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 -Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional : Roda 4 : 113 Unit, Roda 2 : 111 Unit, Kendaraan Dinas Roda 6 : 8 Unit -Terfasilistasinya APK : Mesin Ketik Elektronik : 4 Unit, Rak Arsip : 20 Buah, Lemari Arsip : 2 Unit, AC Split 2 PK : 15 Unit, AC Standing 3 Unit, Videotron : 1 Unit, PC : 11 Unit, Laptop : 6 Unit, Printer : 15 Unit,	-Memperkuat pelaksanaan kegiatan di internal secara berjenjang -Melaksanakan monitoring secara periodik	Biro Umum dan Perlengkapan

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Banten Tahun 2024

Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran = **Rp. 251.934.466.314,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*)

Realisasi Anggaran = **Rp. 235.659.143.463,-** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau **93,54%,**

Sisa anggaran = **Rp. 16.275.322.851,-** (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) atau **6,46%.**

Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Banten Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	78,10	111,57	38.456.493.559	35.271.021.111	91,72	8,28
2	Meningkatnya Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	66,77	94,04	2.315.098.060	2.101.123.330	90,76	9,24%
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,29	3,46	80,65	1.593.966.000	1.472.905.255	92,41	8,59
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100	20.423.743.250	16.138.287.647	79,02	20,98
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	89,23	103,10	1.199.275.200	1.092.751.628	91,12	8,88
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	71,43	71,43	1.492.371.417	1.226.693.887	82,20	17,80
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	133	133	574.133.000	547.289.272	95,32	4,68
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	4.536.9950	4.214.894.381	92,90	7,10
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Yang Terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	100	859.020.000	762.582.595	88,77	11,23
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	100	503.000.000	456.619.136	90,78	9,22
11	Meningkatnya Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi (Penugasan Dan Sekretaris Daerah)	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17	10,72	99,54	356.200.000	291.484.318	81,83	18,17
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan Setda	%	100	100	100	179.120.177.926	171.605.943.909	95,80	4,20
						Jumlah		251.934.466.314	235.659.143.463	6,46

3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 12 sasaran strategis serta 12 indikator yang diampu oleh biro-biro, dan disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap Sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan yang mendukung terhadap capaian sasaran dan kinerja dapat terlihat pada tabel 3.1.7 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.7

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

1. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	78.10	111.57	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang
			Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN %	Menunjang/Tidak Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase capaian Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	100	Menunjang
				Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persen	100	100	100	Menunjang

2. Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan LPSE

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	78,10	95	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	98,40	98,40	MENUNJANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	92,00	92,00	MENUNJANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa			Nilai	86,55	89,23	103,10	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan B. Tingkat Kematangan UKPBJ C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	30,00 31,11 25,43	23,14 40,00 26,09	77,13 128,58 102,60	MENUNJANG
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	75,00	75,00	MENUNJANG
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	MENUNJANG

3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	Menunang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai				
		-	PROGRAM URUSAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	37	37	Menunjang
			Administrasi Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	5	5	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	14	14	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	100	11	11	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang di Implementasikan			Persen	100	100	100	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian	Persen	100	100	100	Menunjang
				Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan	Persen	100	100	100	
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah	Persen	100	100	100	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persen	100	13	13	Menunjang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	Menunang/Tidak Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persen	100	9	9	Menunjang
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persen	100	6	6	Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di Implementasikan			Persen	100			
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	Menunjang
				Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi					Menunjang
				Pembangunan sebagai bahan evaluasi					Menunjang
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	7	7	Menunjang
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	24	24	Menunjang

4. Biro Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70-80	78.10	106,99	ISTIMEWA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	MENUNJANG
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan			Nilai	71	66,77	94,04	BAIK
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persen	100	100	100	MENUNJANG
				Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	MENUNJANG
				Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan	Persen	100	100	100	MENUNJANG

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
				Regulasi Hukum Nasional					
				Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persen	100	100	100	MENUNJANG
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	MENUNJANG

5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai	70	78,10	95	
					Persen	100	100	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	7	7	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persen	5	5	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	2	2	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	6	6	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	13	13	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan			Nilai	84,20	84.20	85	Menunjang
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik			Nilai	91,16	91,16	85	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
4	Meningkatnya Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi			Nilai	11,17	10,72	84,54	Menunjang
			Program Penataan Organisasi	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja	Persen	100	100	100	Menunjang
				Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan	Persen	100	100	100	Menunjang
				Persentase cakupan kegiatan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	Menunjang
				Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja	Persen	100	100	100	Menunjang
			Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen	100	100	100	Menunjang
			Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Kauntabilitas Kinerja	Persen	100	100	100	Menunjang

6. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skorsing/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai	4,29	3,45	80,65	Menunjang
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persen	100	100	100	Menunjang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program /Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN %	Menunjang/Tidak Menunjang
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentasi Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan			Persen	100	100	100	Menunjang
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100	Menunjang

7. Biro Umum dan Perlengkapan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program /Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			Nilai	70	78,10	93,50	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentase Realisasi Pelayanan SETDA			Persen	100	100	100	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	Menunjang/Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Fasilitas Tata Usaha	Persen	100	100	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA	Persen	100	100	100	Menunjang
			Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitas layanan SETDA	Persen	100	100	100	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023, didukung APBD sebesar Rp 248.211.269.200,- (Dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

No.	Nama Program dan Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		2.529.668.560	2.433.824.158	96,21
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.696.640	62.455.466	98,05
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.356.000	10.135.272	97,87
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.474.000	30.466.506,00	93,82
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.600.000	338.703.922,00	80,34
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.001.541.920	1.992.062.992	99,53
II	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa		1.199.275.200	1.092.751.628	91,12
	6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	165.030.000	116.654.457	70,69
	7	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	846.425.200	804.795.565	95,08
	8	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	187.820.000	171.301.606	91,21
JUMLAH			3.728.943.760	3.526.575.786	94,57

2. Biro Hukum

No.	Nama Program dan Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		473.099.076	450.544.624	95,23
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.252.000	92.698.000	96,31
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.000.200	3.887.200	97,18
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.750.000	28.490.000	92,65
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.285.650	127.677.500	89,73
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.811.226	197.791.924	98,99
II	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum		2.315.098.060	2.101.123.330	90,76
	6	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.367.500.060	1.230.077.630	89,95
	7	Fasilitasi Bantuan Hukum	947.598.000	871.045.700	91,92
JUMLAH			2.788.197.136	2.551.667.954	91,52

3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	Nama Program dan Kegiatan		Angaran	Realisasi	Capaian %
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		3.336.773.480	3.032.939.755	90,89
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.854.000	65.993.300	88,16
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000	45.257.600	90,52
	3	Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah	101.350.000	95.090.000	93,82
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.102.000	497.719.400	92,84
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.574.467.480	2.328.879.455	90,46
II	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		1.593.966.000	1.472.905.255	92,41
	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	278.222.000	247.627.045	89,00
	2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	791.844.000	731.375.210	92,36
	3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	523.900.000	493.903.000	94,27
III	Program Kesejahteraan Rakyat		20.423.743.250	16.138.287.647	79,02
	1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	18.801.563.250	15.761.240.577	83,83
	2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.222.180.000	141.220.070	11,55
	3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	400.000.000	235.827.000	58,96
JUMLAH			25.354.482.730	20.644.132.657	81,42

4. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		10.039.139.550	9.397.341.248	93.61
	1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	673.195.000	619.275.862	91.99
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.000.000	59.057.834	98.43
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	717.755.400	625.903.671	87.20
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.000.000	106.532.496	96.85
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.941.194.150	3.771.677.004	95.70
	6	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	3.236.995.000	2.980.739.073	92.08
	7	Fasilitasi Keprotokolan	1.300.000.000	1.234.155.308	94.94
J U M L A H			10.039.139.550	9.397.341.248	93.61

5. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.527.000,00	11.900.775,00	87,98
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.832.204,00	361.127.770,00	91,46
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.650.432.330,00	1.596.125.929,00	96,71
	4. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.253.139,00	46.517.358,00	82,69
II.	Program Perekonomian dan Pembangunan			
	6. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	494.250.750,00	473.946.949,00	95,89
	7. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	448.120.667,00	345.939.196,00	77,20
	8. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	550.000.000,00	406.807.742,00	73,97
III.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			
	5. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	212.900.000,00	199.231.200,00	93,58
	9. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	361.233.000,00	348.058.072,00	96,35
JUMLAH		4.181.549.090,00	3.789.654.991,00	90,63

6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.900.000	20.877.188	99,89
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.000	4.444.720	98,77
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.300.000	5.288.594	99,78
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.043.254	129.934.832	96,94
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.249.648	317.001.660	93,44
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
	6. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	859.020.000	762.582.595	88,77
	7. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.219.200.000	1.080.000.758	88,58
Jumlah		2.582.212.902	2.320.130.347	89,85

7. Biro Umum dan Perlengkapan

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.000.000,00	116.559.669,00	94,76
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.353.061.000,00	106.969.319.160,00	96,06
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.000.000,00	87.344.250,00	91,94
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.000.000,00	230.033.060,00	85,20
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.440.222.389,00	11.953.740.971,00	96,09
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.559.870.075,00	9.113.932.337,00	95,34
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.746.763.220,00	21.477.103.842,00	90,44
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.476.899.985,00	20.308.030.998,00	94,56
	9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16.468.143.677,00	15.983.984.870,00	97,06
	10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.726.980.800,00	7.189.591.323,00	93,05
JUMLAH		203.259.941.146,00	193.429.640.480,00	95,16

4.1 KESIMPULAN

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2024 memiliki dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebanyak 12 indikator, yang capaiannya dalam kategori **“baik”** dan **“sangat baik”**. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; efektifnya pengendalian kinerja perangkat daerah oleh Biro lingkup Setda sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Banten; dan adanya perbaikan layanan umum Sekretariat Daerah.
2. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2024 memiliki tingkat capaian rata-rata lebih dari 80%, sehingga terhadap target akhir tahun 2024 seluruhnya tercapai.
3. Sekretariat Daerah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional.
4. Seluruh indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran sebanyak 12 indikator, 10 indikator tercapai diatas 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: Adanya sinergi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampunan serta adanya sinergi dan kerjasama daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, 3 indikator capaiannya di bawah 100%, yaitu skoring nilai LPPD capaian 81,37% hal tersebut dikarenakan nilai capaian tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2024 dan Nilai komponen SAKIP capaian 95,08%,
5. Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2024 sebanyak Rp. 248.211.269.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.211.269.200,- atau 90.92% terdapat efisiensi sebesar 9.08%.

6. Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 12 sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mampu mewujudkan layanan umum secara prima dan meningkatkan akuntabilitas Sekretariat Daerah.

4.2 SARAN

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro-Biro melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Sekretariat Daerah;
2. Biro-Biro meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal;
3. Biro-Biro meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi agenda biro dengan SKPD teknis guna menuntaskan target kinerja indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
4. Biro-Biro melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan yang bersinergi dengan agenda dan kebijakan Pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Banten;
5. Biro-Biro meningkatkan pengendalian kebijakan yang dilaksanakan SKPD teknis dengan membuat laporan pengendalian kebijakan dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah;
6. Biro-Biro melaksanakan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan serta dapat

mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah;

7. Perlunya koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait tentang perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi, serta pentuan indikator kinerja dan target capaiannya.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya.

Serang, **14** Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Nana Supiana

Lampiran-lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan Telah Di Reviu
- 3) Piagam Penghargaan Mitra Plaza Banten dalam Mewujudkan UMKM Go Digital (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provinsi Banten)
- 4) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-2 Nasional Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi (Biro Hukum)
- 5) Piagam Penghargaan Terbaik Ke-4 Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten Tingkat Provinsi (Biro Hukum)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,



AL MUKTABAR

Pihak Pertama,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si

NIP. 19680902 199603 2 002

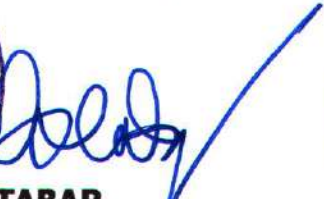
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,75
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,54
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.303
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,04
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	73,16

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	248.211.269.200
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.239.738.564
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.163.824.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.761.309.400
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.106.325.900
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.688.043.200
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	945.580.251
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.690.742.485
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	615.705.400
	JUMLAH BELANJA	248.211.269.200

 **PE. GUBERNUR BANTEN,**

AL MUKTABAR

PI. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. KOMARUDIN, MAP**

Jabatan : **Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN KESEJATERAAN RAKYAT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

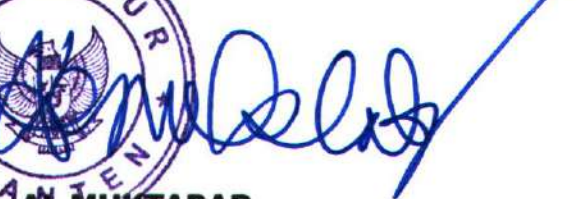
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR



Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 19700721 199101 1 002

**SATUAN KERJA : ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM
DAN KESEJATERAAN RAKYAT**

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63,46
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,68
3	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,2
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,93
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,54
		Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23
5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,35
6	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	56,23
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	50,17

P. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

**Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM
DAN KESEJATERAAN RAKYAT,**

Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 19700721 199101 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Plt. ASISTEN PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

**SATUAN KERJA : ASISTEN PEMBANGUNAN,
PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN**

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	4,92
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persen	5,06
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	3,04
3	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,48
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,8
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	Tinggi
6	Meningkatnya Mitigasi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	145,31

DJ GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

**Plt. ASISTEN PEMBANGUNAN,
PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN,**

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si**

Jabatan : **Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	84,3
		Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	Nilai	3,49

Pt. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Pt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Pihak Pertama,

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002

**SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	4,29
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	25.522.334.610
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.742.315.480
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.840.000.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.940.019.130
	JUMLAH BELANJA	25.522.334.610

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI PRAWOTO, SH**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002



HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	2.846.013.150
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	481.171.850
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.364.841.300
	JUMLAH BELANJA	2.846.013.150


Pj. SEKRETARIS DAERAH,
Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002


Pt. KEPALA BIRO HUKUM,
HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**
Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Pertama,

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002



Pihak Kedua,

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kulaitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100
3	Meningkatnya Kulaitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	5.082.118.956
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.305.418.956
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.580.000.000
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.196.700.000
	JUMLAH BELANJA	5.082.118.956

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

**Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,**

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Pertama,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA
NIP. 19711025 200112 1 001

**SATUAN KERJA : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK**

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3.615.227.946
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.627.908.746
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	987.319.200
	JUMLAH BELANJA	3.615.227.946

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

**Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG/JASA DAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,**

Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA
NIP. 19711025 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
BIROKRASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002


AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	82,87
4	Meningkatnya Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	2.813.464.930
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.464.930
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.210.000.000
	JUMLAH BELANJA	2.813.464.930

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ir. Ni. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI,

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si
NIP. 19730201 200112 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Persentasi Realisasi Pelayanan SETDA	Persen	100
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	201.979.912.248
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.979.912.248
	JUMLAH BELANJA	201.979.912.248

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Dr. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN,



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si
NIP. 19670928 199303 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BENI ISMAIL, S.STP, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Pertama,

BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002

Pihak Kedua,



Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

**SATUAN KERJA : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN
PROTOKOL**

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentasi Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	10.819.147.350
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.819.147.350
	JUMLAH BELANJA	10.819.147.350

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. HJ. VIRGOJANTI, M.Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN PROTOKOL,

BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002

PERUBAHAN **PERJANJIAN KINERJA** **TAHUN 2024**



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
				MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,75	7,75	Target tidak berubah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,54	65,95	Hasil evaluasi Triwulan II RKPD Perubahan, target murni telah tercapai sehingga di lakukan perubahan target
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.303	12.674	Hasil evaluasi Triwulan II RKPD Perubahan, target murni telah tercapai sehingga di lakukan perubahan target
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,52	63,52	Target tidak berubah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2-3	2-3	Target tidak berubah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	73,16	73,16	Target tidak berubah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	252.678.219.190	251.934.466.314	(743.752.876)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	222.559.339.560	222.257.659.387	(301.680.173)
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.210.000.000	2.078.220.000	(131.780.000)
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.840.000.000	1.593.966.000	(246.034.000)
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.940.019.130	20.423.743.250	483.724.120
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.364.841.300	2.315.098.060	(49.743.240)
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.580.000.000	1.492.371.417	(87.628.583)
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	987.319.200	1.199.275.200	211.956.000
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.196.700.000	574.133.000	(622.567.000)
JUMLAH		252.678.219.190	251.934.466.314	(743.752.876)


Pj. GUBERNUR BANTEN,
AL MUKTABAR


Pj. SEKRETARIS DAERAH,
USMAN ASSHIDDIQI OOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Metode perhitungan : Proporsi penduduk miskin yang ditangani/ jumlah seluruh penduduk miskin Provinsi *100%	Persen	7,12	7,75	7,75	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : a = Jumlah Angkatan Kerja b = Jumlah penduduk 15 thn keatas	Persen	64,95	65,54	65,95	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Metode perhitungan : $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$	Ribu Rupiah	12.601	12.303	12.674	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Metode perhitungan : IKLH = (0.376 x IKA)+(0.405 x IKU)+(0.219 x IKL) Keterangan : IKA = Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) IKU = Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	62,52	63,52	63,52	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET												
						MURNI	PERUBAHAN													
			IKL = Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Klasifikasi Kategori Nilai IKLH 2020-2024 <table><tr><th>SKOR</th><th>KRITERIA</th></tr><tr><td>90-100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70-89,9</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50-69,9</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>25-49,9</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>0-24,9</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	SKOR	KRITERIA	90-100	Sangat Baik	70-89,9	Baik	50-69,9	Sedang	25-49,9	Buruk	0-24,9	Sangat baik					
SKOR	KRITERIA																			
90-100	Sangat Baik																			
70-89,9	Baik																			
50-69,9	Sedang																			
25-49,9	Buruk																			
0-24,9	Sangat baik																			
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Metode perhitungan : Hasil survey penilaian integritas dari KPK Keterangan : Nilai Konversi: 1-1,75 (25-43,750) 1,76-2,50 (43,76-62,50) 2,51-3,25 (62,51-81,25) 3,26-4,00 (81,26-100)	Nilai	3,2	2-3	2-3	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026												
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Metode perhitungan : Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB	Nilai	69,23	73,16	73,16	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026												



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. KOMARUDIN, MAP**

Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. KOMARUDIN, MAP
NIP. 19700721 1991011 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Metode perhitungan : Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Metode perhitungan : $IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$ Keterangan : IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Nilai	53,56	63,46	63,46	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Metode perhitungan : $IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$ Keterangan : IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Indeks	0,6803	0,68	0,68	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
3	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Metode perhitungan : $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ Sekolah\ Penduduk\ ke - i)$ Keterangan : 1. P15+ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas 2. Lama sekolah penduduk ke-i • Tidak pernah sekolah = 0	Tahun	9,15	9,20	9,23	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
			- Masih sekolah di SD sampai dengan S1=konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1 - Masih sekolah di S2/S3=konversi ijazah terakhir +1 - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir=konversi ijazah terakhir - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir=konversi ijazah terakhir+kelas terakhir-1 3. Tahun konversi ijazah - Tidak punya ijazah=0 - SD=6 tahun; SMP=9 tahun; SMA=12 tahun - D1/D2=14 tahun; D3=15 tahun; D4=16 tahun; S1=17 tahun S2=19 tahun; S3= 22 tahun.					
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Metode perhitungan : $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Tahun	13,09	13,93	13,93	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Metode perhitungan : $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ AHH : Angka Harapan Hidup Metode perhitungan : $PAB(5)SP_{stunting} \frac{PAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : PAB(5)Psstunting = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5)Psstunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama	Tahun	74,77	70,54	74,82	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
		Prevalensi Stunting pada Balita		Persen	24	23	23	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Metode perhitungan : IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	Indeks	92,18	93,35	93,35	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
6	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Metode perhitungan : Survei untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan terdiri dari 7 dimensi yakni Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi	Nilai	51,41	56,23	56,23	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Pertama,

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

Pihak Kedua,

SATUAN KERJA : ASISTEN PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Metode perhitungan : Pertumbuhan PMTB= Pertumbuhan PMTB tahun N-1/pertumbuhan PMTB N-2 *100 persen	Persen	3,43	4,92	4,92	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Metode Penghitungan : Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t $LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ Keterangan : LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi Yit = PDRB Sektor Industri atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) Yi(t-1) = PDRB Sektor Industri atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)	Persen	5,82	5,06	5,82	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Metode Penghitungan : Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t $LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$	Persen	1,31	3,04	3,98	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
			Keterangan : LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi $Y_{it} = \text{PDRB Sektor}$ Perdagangan atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) $Y_{it}(t-1) = \text{PDRB Sektor}$ Perdagangan atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)					
3	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Metode perhitungan : Kontribusi sektor pariwisata $\text{Kontribusi Pariwisata} / \text{Kontribusi PDRB} * 100\%$	Persen	5,1	4,48	5,1	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Kelautan	Metode Penghitungan : Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t $LPE = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{it(t-1)}} - 100$ Keterangan : LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi $Y_{it} = \text{PDRB Sektor Pertanian dan Kelautan atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)}$	Persen	0,14	0,8	0,8	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
			Yi(t-1) = PDRB Sektor Pertanian dan Kelautan atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)					
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Metode perhitungan : Capain rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih + capaian rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi + persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik/3 komponen tersebut*100%. Kemudian di interpretasi sebagai berikut: • SANGAT TINGGI : $\geq 91-100\%$ • TINGGI : $\geq 76-90\%$ • SEDANG : $\geq 66-75\%$ • RENDAH : $\geq 51-65\%$ • SANGAT RENDAH : $\leq 50\%$	Nilai	Tinggi	Tinggi		Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
6	Meningkatnya Mitigasi Kesiapsiagaan	Indeks Risiko Bencana	Metode perhitungan : Risk (R) = H x V / C	Nilai	132,21	145,31	145,31	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
	dan Tanggap Darurat Bencana		Keterangan : R (Risk) = Indeks Rasio Bencana H = Bahaya (<i>hazard</i>) V=Kerentanan (<i>vulnerability</i>) C = Kapasitas (<i>capacity</i>)					Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



P. GUBERNUR BANTEN,

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos. M.Si

NIP. 19650824 198712 1 002

ASISTEN PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN PENGADAAN,



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si**

Jabatan : **ASISTEM ADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Pertama,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode perhitungan : IPKD= D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6 D.1=Skor rata-rata x bobot $Skor D1.1 = \frac{Jumlah\ Skor\ Kesesuaian}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.2 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Program}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.3 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Program}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.4 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Pagu}{Jumlah\ Program}$ $Skor D1.5 = \frac{Jumlah\ Kesesuaian\ Pagu}{Jumlah\ Program}$ Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot	Indeks	77,012	84,3	84,3	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Metode perhitungan : Survei eksternal Keterangan : 1,00-2,5 (25-64,99) Tidak baik 2,60-3,064 (65,00-76,60) kurang 3,0 -3,5 (76,61-88,30) baik 3,6-4 (88,31-100) sangat baik	Nilai		3,49	3,74	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



P1 GUBERNUR BANTEN,

BA AL-MUKTABAR

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M. Si
NIP. 19671228 199312 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang,

2024



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Pihak Pertama,

AGUS MINTONO, SH, M.Si
NIP. 19680805 199803 1 010

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.742.315.480	3.336.773.480	(405.542.000)
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.840.000.000	1.593.966.000	(246.034.000)
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.940.019.130	20.423.743.250	483.724.120
	JUMLAH	25.522.334.610	25.354.482.730	(167.851.880)

 Pj. SEKRETARIS DAERAH USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si NIP. 19700320 200112 1 001	Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH,  AGUS MINTONO, SH, M.Si NIP. 19680805 199803 1 010
--	--

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil penilaian dokumen LPPD pemerintah daerah yang dinilai oleh kemendagri berdasarkan status kinerja penyelenggaraan daerah 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: 1-1,8 (sangat rendah) 1,81-2,60 (rendah) 2,61-3,40 (sedang) 3,41-4,20 (tinggi) 4,21-5 (sangat tinggi)	Nilai	3,45	4,29	4,29	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
3	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Dokumen Kebijakan KESRA yang di implementasikan/ Σ Target Dokumen yang dirumuskan X 100%	Persen	100	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI PRAWOTO, SH**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

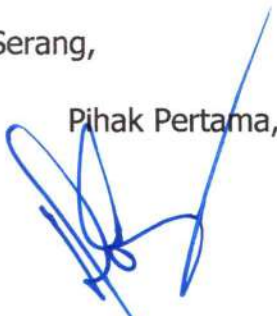
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Kedua,

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Pihak Pertama,

HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	481.171.850	473.099.076	(8.072.774)
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.364.841.300	2.315.098.060	(49.743.240)
	JUMLAH	2.846.013.150	2.788.197.136	(57.816.014)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, SH
NIP. 19670619 199403 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks kualitas kebijakan Publik Provinsi dinilai oleh LAN RI berdasarkan Surat Edaran LAN Nomor: 4/K-1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan: SB > 90 B > 81-89,99 S> 71-80,99 C > 60-70,99 K > 59,99	Nilai	65	71	71	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Pihak Kedua,

Serang, 2024

Pihak Pertama,

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.305.418.956	2.115.044.673	(190.374.283)
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.580.000.000	1.492.371.417	(87.628.583)
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.196.700.000	574.133.000	(622.567.000)
	JUMLAH	5.082.118.956	4.181.549.090	(900.569.866)

Pj. SEKRETARIS DAERAH



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Plt. KEPALA BIRO
PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19650824 198712 1 002

SATUAN KERJA : BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Dokumen Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan/ Σ Target Dokumen yang dirumuskan X 100%	Persen	100	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Dokumen Kebijakan Administrasi Kebijakan yang disahkan/ Σ Target Dokumen yang dirumuskan x 100% Dokumen Rekomendasi Pengendalian Administrasi Kebijakan yang disampaikan/ Σ Target Dokumen pengendalian yang di susun X 100%	Persen	100	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA, ST**
Jabatan : **KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Kedua,


USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Pihak Pertama,



Dr. Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA, ST
NIP. 19711025 200112 1 001

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.627.908.746	2.529.668.560	(98.240.186)
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	987.319.200	1.199.275.200	211.956.000
	JUMLAH	3.615.227.946	3.728.943.760	113.715.814

Pj. SEKRETARIS DAERAH



USMAN ASSHIDDIQI OOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. NIP. 19700320 200112 1 001

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK,

Dr. Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA, ST
NIP. 19711025 200112 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SE Kepala LKPP No. 4/2021 Tentang Indeks Tata Kelola PBJ	Nilai	88,59	86,55	88,59	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Pihak Pertama,

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.464.930	503.992.902	(99.472.028)
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.210.000.000	2.078.220.000	(131.780.000)
	JUMLAH	2.813.464.930	2.582.212.902	(231.252.028)



Pj. SEKRETARIS DAERAH

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. NIP. 19700320 200112 1 001

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI,

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

SATUAN KERJA : BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Nilai	84,2	41-60	84,2	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	S = Jumlah Komponen Indikator Variabel Penilaian	Nilai	91,16	82,87	91,16	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
4	Meningkatnya Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai Sakip Komponen Pelaporan Penilaian dari Kementerian PAN RB	Nilai	10,72	11,17	11,17	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E., M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, 2024

Pihak Pertama,

Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E., M.Si
NIP. 19670928 199303 2 009



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.979.912.248	203.259.941.146	1.280.028.898
	JUMLAH	201.979.912.248	203.259.941.146	1.280.028.898

Pj. SEKRETARIS DAERAH



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. NIP. 19700320 200112 1 001

Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN
PERLENGKAPAN,

Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E., M.Si.
NIP. 19670928 199303 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BENI ISMAIL, S.STP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang,

2024



Pihak Kedua,

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Pihak Pertama,

BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.819.147.350	10.039.139.550	(780.007.800)
	JUMLAH	10.819.147.350	10.039.139.550	(780.007.800)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



USMAN ASSHIDDIQI OOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. NIP. 19700320 200112 1 001

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN PROTOKOL,**



BENI ISMAIL, S.STP, M.Si
NIP. 19760905 199602 1 002

SATUAN KERJA : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentasi Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	Σ Realisasi Kegiatan Pelayanan Pimpinan/ Σ Target Kegiatan Pelayanan Pimpinan X100%	Persen	100	100	100	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang mendasar dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 2⁸ Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Banten

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19681012 198803 2 003



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024

Diberikan kepada :

PROVINSI BANTEN

Sebagai :

**Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik IV Tahun 2024
Tingkat Provinsi**

dalam rangka Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 14 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



YASONNATUL LAOLY



Anggota JDIHN

Terbaik IV

Kategori Provinsi :
Provinsi Banten



MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: M.HH-12.OT.03.01 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

Sebagai:

TERBAIK II

Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kategori Tingkat Pemerintah Provinsi

Jakarta, 16 Desember 2024

MENTERI HUKUM,



SUPRATMAN ANDI AGTAS





MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024

Diberikan kepada :

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Yang telah :

Membina dan Membangun Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Jakarta, 10 Desember 2024

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Natalius Pigai